

Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Syariah

Boy Samsul Bakhri¹

INFO ARTIKEL

Penulis:

¹Universitas Islam Riau

*E-mail:

kiat.internasional@gmail.com

Untuk mengutip artikel ini:

Bakhri, BS, 2015, 'Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Syariah', Vol. 26, No. 2, Hal. 32-37.

Akses online:

<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>

E-mail:

kiat@jurnal.uir.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengubah ASEAN menjadi kawasan dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan arus modal yang bebas. Masyarakat Ekonomi ASEAN akan menjadi kekuatan pendorong integrasi ekonomi di negara-negara ASEAN, dan antara negara-negara ASEAN dan seluruh dunia. Banyak yang percaya integrasi ekonomi akan mewujudkan kerangka ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan kawasan, untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih merata, dan sebagai batu loncatan menuju integrasi penuh ke dalam ekonomi global. Komitmen implementasi *blueprint* AEC oleh negara-negara anggota ASEAN dan para pemangku kepentingan ekonomi syariah akan menjadi peran penting untuk mencapai tujuan Visi, Misi, dan Target ASEAN.

The ASEAN Economic Community (AEC) will transform ASEAN into a region with free movement of goods, services, investment, skilled labor, and free flow of capital. ASEAN Economic Community will be the driving force of economic integration within ASEAN countries, and between ASEAN countries and the rest of the world. Many believe the economic integration will realize the ASEAN framework as a single market and production base, to increase competitive economic national and region, to support more equitable economic development, and as a stepping stone toward full integration into the global economy. Commitments of the implementation of AEC Blueprint by ASEAN member countries and the sharia economic stakeholders will be a crucial role to achieve the objective of the ASEAN Vision, Mission, and Targets.

Katakunci: ASEAN, AEC, MEA, Ekonomi Syariah

1. Pendahuluan

ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai diberlakukan 31 Desember 2015 merupakan bentuk integrasi ekonomi regional. Dengan asumsi, persaingan bebas akan mendorong setiap negara ASEAN melakukan efisiensi yang optimal dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila mekanisme dalam integrasi ekonomi regional berjalan dengan baik di setiap negara, maka semua yang terlibat akan memperoleh keuntungan, meski keuntungan tersebut tidak akan merata sebarannya.

Cetak biru MEA adalah ambisi membentuk ASEAN sebagai pusat perdagangan kawasan yang terintegrasi. Cetak biru tersebut memuat empat pilar utama yaitu *pertama*, ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas, *kedua*, ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*, *ketiga*, ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam), dan *keempat*, ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global.

Dengan adanya empat pilar utama yang termuat dalam cetak biru tersebut, maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN. Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian ASEAN, serta turut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup penduduk negara anggota ASEAN. Disamping harapan kontribusi Indonesia terhadap kemajuan perekonomian ASEAN tersebut, Indonesia tentunya terlebih dahulu harus memperkuat perekonomian nasionalnya. Konsekuensi bergabungnya Indonesia dalam MEA tentunya harus didukung oleh kekuatan ekonomi Indonesia, sebab pada era MEA mendatang Indonesia akan menghadapi pemain-pemain yang lebih kompetitif dari negara-negara yang tergabung dalam MEA.

MEA diharapkan dapat disejajarkan dengan komunitas serupa seperti Uni Eropa. Bedanya dengan Uni Eropa, MEA masih menggunakan mata uang sendiri-sendiri, belum bebas paspor, dan belum punya satu bank sentral. Secara teknis, pencapaian MEA menggunakan mekanisme dan inisiatif yang telah dibentuk oleh ASEAN yang diperkuat dengan penguatan institusi dalam kerjasama ASEAN. Masing-masing institusi dan inisiatif yang terlibat dilima elemen pasar tunggal (arus barang bebas, arus jasa bebas, arus investasi bebas, arus modal bebas, dan arus tenaga kerja bebas) dalam kesatuan basis produksi.

2. Metodologi

Pendekatan yang dipakai dalam tulisan ini adalah pendekatan deskriptif (studi kepustakaan). Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang dibahas. Informasi itu dapat diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lain baik tercetak maupun elektronik.

3. Pembahasan

Kecemasan yang Wajar

Ada kecemasan menyongsong MEA tersebut. Ini reaksi yang wajar jika dilihat dengan kesiapan kita menghadapi persaingan dibandingkan dengan negara anggota ASEAN yang lainnya. Pertanyaan bernada cemas setiap ada komitmen liberalisasi, walaupun masih dalam batas-batas yang kita sepakati, selalu muncul ketika hendak dilaksanakan. Cemas kita akan dirugikan, dan cemas kita akan kalah bersaing. Sikap seperti ini memang sudah ada sejak awal berdirinya ASEAN di tahun 1967.

Kecemasan tentu menjadi hal yang wajar terhadap pemberlakuan MEA, mengingat sejauh ini belum semua masyarakat tahu apa itu MEA, hasil survei menunjukkan bahwa pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, maupun masyarakat di negara ini masih rendah pemahaman dan pengetahuannya terhadap MEA. Sungguh ironis, negara-negara ASEAN lain sudah secara intens menyiapkan langkah-langkah menyongsong MEA, sementara masyarakat Indonesia sebagian besar belum mengetahui apa itu MEA.

Pentingnya Daya Saing

Salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia adalah daya saing. *World Economic Forum* (WEF) merilis data *The Global Competitiveness Index*, daya saing Indonesia berada dibawah Singapura dan Malaysia. WEF mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan suatu negara untuk mencapai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang terus menerus tinggi. Itu artinya, setiap negara harus menjaga mesin pertumbuhan ekonomi agar tetap berkelanjutan sehingga angka total PDB dan PDB per kapita tetap tinggi. Hasil penelitian Bank Indonesia (BI) terkait daya saing di sektor mikro khususnya pasar barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan modal memperlihatkan juga Indonesia masih tertinggal dibanding Singapura, Malaysia atau Thailand. Pelaku usaha pun dituntut untuk juga segera berbenah jika tidak ingin tertinggal dalam persaingan bebas. Efisiensi produksi dan kreativitas menjadi kata kunci dalam bersaing. Dari ribuan perusahaan di Indonesia, majalah *Forbes* hanya mencatat tujuh perusahaan lokal yang berskala multinasional. Ini sebenarnya sudah lumayan, tapi masih diperlukan lebih banyak lagi perusahaan dalam skala tersebut.

Disisi kesiapan tenaga kerja Indonesia menurut *Asian Productivity Organization* (APO) menunjukkan, dari

setiap 1.000 tenaga kerja Indonesia hanya ada sekitar 4,3% yang terampil, sedangkan Filipina 8,3%, Malaysia 32,6%, dan Singapura 34,7%. Ini tentu mencemaskan, dan apabila tetap stagnan maka dapat dipastikan tenaga kerja Indonesia akan kalah bersaing dengan tenaga kerja negara ASEAN lain. Ini artinya kita bisa menjadi tamu di negeri sendiri. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dengan merujuk pada kajian *United Nations Development Programme* (UNDP) juga menunjukkan pada kondisi yang tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Sisa waktu menjelang pemberlakuan MEA, merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dengan segera berbenah diri. Urusan berbenah diri ini sejatinya pekerjaan segenap pemangku kepentingan mulai dari masyarakat, pelaku usaha, otoritas dalam hal ini pemerintah selaku otoritas fiskal dan BI selaku otoritas moneter. Indonesia punya jumlah populasi besar, yakni 237 juta jiwa dengan angkatan kerja produktif sekitar 56,6% yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai bonus demografi. Namun pekerja ini mesti segera berbenah dalam hal membangun daya saing individu agar memiliki keterampilan yang tak kalah dengan individu negara tetangga. Kehadiran MEA akan membuka selebar-lebarnya lalu lintas tenaga kerja terampil. Negara yang berlimpah tenaga terampil akan diminati investor untuk berinvestasi, dan mampu menghimpun dana lebih besar untuk membiayai pembangunan.

Membangun iklim kondusif merupakan pekerjaan pemerintah untuk menarik sebanyak mungkin investor ke dalam negeri. Semakin besar arus investasi masuk, baik asing maupun lokal, akan menjadi salah satu elemen yang ikut mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Kelahiran sebuah industri akan berdampak luas terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian nasional. Upaya pemerintah dalam terus memperbaiki infrastruktur yang dikeluarkan melalui belanja pemerintah pun akan menjadi faktor yang ikut meningkatkan daya saing nasional. BI selaku otoritas moneter pun harus berperan menjaga stabilitas makroekonomi yang tercermin pada angka inflasi yang rendah sehingga membuat daya saing usaha semakin kompetitif.

Angka inflasi kita tercatat lebih tinggi dari inflasi di Singapura, Malaysia, dan Thailand yang menjadi pesaing utama Indonesia memasuki MEA. Angka inflasi itu terus diupayakan setara dengan ketiga negara tersebut ketika MEA diberlakukan. Dengan demikian, BI bersama pemerintah berupaya menggiring angka inflasi nasional sama dengan angka inflasi negara-negara tetangga di kawasan ini agar daya saing perekonomian nasional meningkat sehingga rumahtangga masyarakat dan rumah tangga industri siap bertarung menghadapi produk dan jasa negara tetangga. Dengan demikian, efisiensi produksi barang, tingkat harga barang dan jasa, serta biaya dana sudah pada tingkat yang sama dengan negara tetangga. Sekarang tinggal bagaimana individu rumah tangga (masyarakat, pekerja, dan usaha kecil) serta rumah tangga industri di negeri ini menyiapkan diri menghadapi persaingan.

Cintai Produk Nasional

Bagi masyarakat rumah tangga konsumen Indonesia dengan diberlakukannya MEA akan tersedia beragam pilihan produk dan jasa asal negara tetangga. Dalam teori ekonomi, beragamnya pilihan akan membuat hidup masyarakat konsumen lebih sejahtera karena masyarakat punya alternatif dalam memilih produk dan jasa yang diperlukan sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

Tapi seandainya kelompok masyarakat kelas menengah Indonesia yang berjumlah 45 juta jiwa dengan kemampuan daya belinya lebih condong memilih produk dan jasa negara tetangga, apa dampaknya bagi perekonomian dalam negeri? Kalau sampai terjadi maka industri-industri dalam skala UMKM berpotensi akan berguguran. Itu artinya, tidak ada investasi di industri yang menyerap tenaga kerja yang nantinya bisa membentuk kelompok masyarakat dengan kemampuan daya beli. Muara dari ketiadaan investasi dan daya beli masyarakat akan memukul laju pertumbuhan ekonomi serta menurunkan tingkat kesejahteraan.

Masyarakat konsumen Indonesia memang perlu didorong semangatnya untuk mencintai produk dalam negeri. Dalam hal nasionalisme mencintai produk dalam negeri, kita perlu belajar dari rakyat Korea Selatan misalnya, yang menyadari dengan memakai produk sendiri akan memberi manfaat bagi perekonomian dalam negeri yang pada akhirnya menyejahterakan mereka juga.

Kehadiran MEA juga akan berdampak terhadap rumah tangga selaku produsen berskala UMKM. Seperti diketahui masalah utama UMKM adalah permodalan dan akses ke perbankan, lemahnya manajemen usaha, serta produktivitas pekerja. Dalam kondisi seperti ini, produk UMKM harus berhadapan dengan membanjirnya produk murah asal Cina dan produk negara tetangga pasca diberlakukannya MEA.

Jadi, kehadiran MEA bagi masyarakat rumah tangga di Indonesia, di satu sisi semakin menyejahterakan dengan beragam pilihan produk dan jasa, tapi pada sisi lain berpotensi melindas produk UMKM yang tak memiliki daya saing. Segera berbenah merupakan langkah yang bijak. Lebih dari itu, kecintaan akan produk dalam negeri bisa menjadi faktor penyelamat eksistensi industri nasional yang memperkerjakan tenaga kerja lokal. Pada akhirnya, perekonomian pun terus bertumbuh.

Segera Susun Strategi

Semua negara anggota ASEAN tidak lama lagi akan menghadapi pasar tunggal dan terbuka yang berbasis produksi. Pembentukan MEA tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota ASEAN sehingga mampu menghadapi persaingan pada lingkup regional dan global. Hal ini dinilai sebagai suatu kemajuan yang sangat signifikan sebagai respon terhadap *care of human security* yang mencakup keamanan politik, keamanan komunitas ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, dan keamanan individu. Tentu menjadi sebuah peluang

sekaligus tantangan bagi Indonesia, bahkan bagi daerah-daerah di negara kita ini. Oleh karenanya kesiapan dan langkah ataupun strategi, penting untuk dilakukan guna menghadapi liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas yang dikemas dalam bentuk MEA.

Selagi masih ada waktu menjelang diberlakukannya MEA, industri di dalam negeri perlu segera berbenah. Persoalan yang masih membelit di internal industri perlu segera diurai melalui upaya perbaikan berkelanjutan dan inovasi teknologi. Masalah seperti kapasitas produksi yang belum optimal dan ketergantungan pada barang modal impor karena hanya berperan selaku pemasok bahan baku dan bahan penolong. Selain itu, produksi barang setengah jadi dan komponen, serta populasi industri berteknologi tinggi yang masih terbatas jumlahnya.

Sementara itu, dari sisi eksternal, sektor industri di dalam negeri juga masih menghadapi masalah klasik seperti lemahnya jaringan infrastruktur (jalan raya, pelabuhan, kereta api, pasokan energi, dan lainnya). Di luar itu, masih ada masalah perburuhan, kepastian hukum, dan tingginya tingkat bunga bank. Diperlukan koordinasi kebijakan antar sektor untuk mencari jalan keluar guna mempersiapkan industri nasional yang memiliki daya saing. Indonesia perlu menyusun dan memiliki strategi besar guna menyambut MEA. Strategi inilah yang nantinya menjadi bahan rujukan melakukan langkah aksi menghadapi MEA bagi segenap pemangku kepentingan.

Salah satu strategi yang bisa dipertimbangkan yaitu memilih salah satu dari 12 (duabelas) sektor prioritas MEA (produk pertanian, produk kayu, produk karet, produk perikanan, angkutan udara, otomotif, elektronik, tekstil dan produknya, jasa kesehatan, logistik, pariwisata, dan e-ASEAN) untuk dijadikan prioritas. Sektor pariwisata misalnya, bisa diusung karena punya keunikan dan keberagaman budaya serta panorama alam. Agar sektor ini memiliki daya saing, perlu didukung dengan perbaikan dibidang transportasi, infrastruktur, SDM pariwisata yang handal, ketersediaan jasa keuangan di lokasi tujuan wisata dan lainnya.

Semua pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah menjadi penting untuk menyiapkan langkah-langkah dalam menghadapi MEA. Hal ini dimaksudkan agar keduanya memiliki peran integratif dalam menghadapi MEA. Disamping itu, diharapkan juga dengan adanya kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat terbangun sinergisitas yang hasilnya tidak hanya dirasakan oleh satu pihak, melainkan dapat dimanfaatkan secara nasional. Meskipun waktu yang tersedia sangat pendek, upaya tetap harus dilakukan daripada tanpa usaha sama sekali.

Langkah yang dapat dilakukan pemerintah pusat adalah dengan meningkatkan peran kelembagaan ekonomi dalam perekonomian nasional. Kelembagaan ekonomi yang diharapkan berperan penting untuk mendukung daya saing ekonomi nasional dalam menghadapi MEA, misalnya impor, pasar barang dan jasa. Pemerintah harus jeli dalam melihat jenis barang dan jasa apa saja yang layak

jual dalam pasar bebas tersebut. Tanpa adanya standarisasi, sangat mungkin barang dan jasa yang ditawarkan Indonesia menjadi tidak laku mengingat negara-negara lain pasti menawarkan produk dan jasa yang berkualitas baik. Langkah lain yang dapat diambil adalah perlindungan konsumen karena konsumen sebagai pengguna tentu memiliki keinginan rasa aman atas apa yang dikonsumsi.

Sedangkan langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah peningkatan pemahaman masyarakat daerah terhadap MEA dengan melakukan sosialisasi dan edukasi mengingat nantinya daerah yang akan berperan penting dalam MEA karena produk dan jasa sesungguhnya berasal dari daerah, perbaikan iklim investasi dan iklim usaha di daerah dengan mempermudah pelayanan perizinan dan menghapus berbagai regulasi yang tumpang tindih, peningkatan infrastruktur daerah (terutama jalan, energi, pelabuhan, dan telekomunikasi), peningkatan daya saing ekspor unggulan daerah dengan memberikan fasilitas pengembangan industri berorientasi ekspor, peningkatan kualitas SDM daerah dengan menyelenggarakan diklat sesuai standar kompetensi tenaga kerja ASEAN, penciptaan iklim ketenagakerjaan daerah yang lebih kondusif dengan meninjau ulang pengaturan upah minimum provinsi/kabupaten/kota, dan melakukan sinergi serta sinkronisasi antara strategi dan program pemerintah dengan strategi dan program swasta dalam mencermati dan memanfaatkan peluang pasar ASEAN.

Harus Selalu Siap

Ketatnya persaingan usaha di dalam negeri tidak terlepas dari besarnya potensi Indonesia di mata negara tetangga. Indonesia saat ini menyumbang 40% PDB dan penduduknya mencapai 50% atas keseluruhan penduduk ASEAN. Ditopang konsumsi domestik, ekonomi Indonesia tumbuh solid di tengah krisis global. Belum lagi kenyataan bahwa kelas menengah kita tumbuh pesat dengan daya beli yang solid. Dalam laporan *McKinsey* diungkapkan bahwa dengan menjaga kekuatan kelas menengah, Indonesia menyalip Inggris dan menjadi kekuatan ekonomi nomor tujuh dunia pada tahun 2030. Bayangkan, bagaimana negara tetangga yang pasar domestiknya terbatas dan potensi pertumbuhannya mendekati puncak tidak tergiur mengincar kita. Indonesia ibarat kembang desa yang menarik para pemuda desa tetangga.

Memang MEA menjanjikan manfaat bagi Indonesia baik dari sudut pandang sebagai anggota ASEAN maupun secara individu negara. Dari sudut pandang kawasan, dengan penduduk 588 juta jiwa dan PDB nominal US\$2,1 milyar, ASEAN menawarkan skala ekonomi untuk mampu bersaing dengan Cina dan India. Integrasi ekonomi juga mendorong aliran investasi dan perdagangan antara negara anggota yang lebih tinggi sehinggalah dapat memunculkan perusahaan-perusahaan kawasan yang mampu bersaing secara global. Dari sudut Indonesia sendiri, persaingan yang ketat dipasar domestik pada pasarnya menguntungkan konsumen berkat tawaran variasi dan

kualitas barang dan jasa yang lebih kaya dan berharga kompetitif. Integrasi ekonomi juga memberi peluang lebih besar bagi masyarakat dan produsen Indonesia untuk mengeksplorasi pasar negara tetangga kita di ASEAN.

Kita berharapan berusaha agar MEA dapat memberi manfaat nyata bagi konsumen, produsen dan juga ekonomi secara keseluruhan. Tapi masalahnya, manfaat bagi produsen kita hanya dipetik bila produsen kita mampu bersaing dalam MEA. Terlebih apabila mereka ingin menyaingi dan bersaing di pasar regional. Bila tidak berdaya saing, mereka terancam tersingkir dan bahkan gulung tikar. Selain itu, ekonomi Indonesia secara keseluruhan mengambil manfaat apabila produsen kita memenangkan persaingan. Kemenangan itu memberi kesempatan produsen itu untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Laba yang diperoleh juga menambah konsumsi dan investasi di perekonomian. Selain memberinilai tambah ekonomi, produsen tersebut juga membantu kinerja neraca berjalan.

Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, "*Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri*" (QS. Al-Raad:11). Setiap bangsa akan menghadapi tantangan dan tantangan tersebut dikembalikan pada masing-masing bangsa apakah akan menyikapi dengan positif ataupun negatif. Sebagai umat Islam tentu kita jadikan tantangan ini dengan positif yaitu menjadikannya sebagai peluang.

Mungkin kita semua pernah membaca atau sekedar tahu tentang adanya Sarekat Dagang Islam (SDI), kehadirannya pada waktu itu yang dianggap mustahil oleh berbagai kalangan namun SDI yang semula dimaksudkan sekedar menjadi koperasi pedagang batik, gaung kehadirannya ternyata mampu melintasi wilayah ekonomi. SDI menjadi simbol perlawanan bangsa Indonesia atas kesewenang-wenangan asing pada saat itu. Dalam waktu yang relatif singkat, SDI pada waktu itu menyebar ke seluruh pelosok nusantara. Sejarah lain mencatat bahwa setelah berdirinya SDI banyak berdiri perserikatan-perserikatan atas nama Islam diantaranya adalah, Perserikatan Muhammadiyah (1912), Al-Irsyad (1913), Persatuan Islam (1923), Nahdlatul Ulama (1926) dan lain-lain.

Dari kilasan sejarah diatas tentu umat Islam Indonesia saat ini perlu mengambil pelajaran positif dalam menghadapi MEA tentang bagaimana menyikapi berlakunya hal ini dari para pejuang Islam terdahulu. Mereka bersatu membentuk perserikatan-perserikatan muslim yang bertujuan melawan segala tantangan yang ada baik dari segi aqidah, ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Ini tidak menjadi hal yang mudah disaat suasana politik bangsa tidak menentu berpengaruh pada semua lini-lini kehidupan masyarakat. Ditambah lagi dengan kondisi umat Islam saat ini yang sebagian justru apatis dengan ke-Islaman-nya.

Padahal perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini sangat menggembirakan. Hal ini dapat

terlihat pada pranata-pranata ekonomi syariah di Indonesia misalnya, seperti regulasi perbankan syariah oleh BI, DSN-MUI yang mengeluarkan fatwa terkait produk keuangan syariah, standar dalam penyajian dan pelaporan akuntansi keuangan syariah oleh DSAK-IAI, dan kini Indonesia juga telah memiliki lembaga baru yang menandakan era baru pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan sektor jasa keuangan secara independen, dan akuntabel, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pranata pendukung pengembangan ekonomi syariah lainnya yang secara jelas menggambarkan suatu rancang bangun ekonomi syariah yang kian kokoh dan progresif di Indonesia.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat terlihat melalui banyaknya jumlah entitas bisnis yang bergerak dengan prinsip syariah seperti; Bank Syariah (BUS, BPRS, UUS), Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat, dan sebagainya. Perkembangan ekonomi syariah yang signifikan tersebut nampaknya juga harus diuji ketahanan, keandalan dan berkelanjutannya memasuki MEA. Tantangan persaingan yang semakin ketat dan kompetitif dari negara-negara anggota ASEAN harus dapat memitigasi sejak dini oleh para penggiat ekonomi syariah di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, beberapa negara anggota ASEAN seperti Singapura dan Malaysia, merupakan dua negara yang memiliki reputasi pengembangan ekonomi syariah yang lebih baik dibanding Indonesia.

Populasi masyarakat muslim yang tinggi dan ekonomi syariah yang terus berkembang diharapkan dapat meningkatkan pengembangan ekonomi nasional. Dengan penerapan ekonomi syariah ini diharapkan mampu menjadi kekuatan ekonomi nasional di tingkat ASEAN maupun dunia global. Dengan adanya MEA para pegiat ekonomi syariah juga harus mengambil peran dalam menghadapi persaingan negara-negara anggota ASEAN. Indonesia tidak boleh kalah bersaing atau bahkan terjajah di negerinya sendiri karena dibanjiri produk-produk impor dengan kualitas yang tinggi. Salah satu tantangan terbesar perkembangan ekonomi syariah adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah serta bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah itu sendiri. Disamping itu ekonomi syariah sejauh ini lebih banyak bergerak pada sektor lembaga keuangan saja.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah sebagai langkah penguatan ekonomi syariah di Indonesia menuju MEA. *Pertama*, pemerintah harus melakukan konsultasi publik dan sosialisasi seluas-luasnya ke seluruh wilayah Indonesia sehingga masyarakat dapat memahami secara baik mengenai MEA. *Kedua*, pemerintah juga diharapkan serius merumuskan cetak biru pengembangan ekonomi syariah yang efektif. Cetak biru tersebut merupakan bagian yang terintegrasi dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). *Ketiga*, pemerintah perlu menggerakkan berbagai instrumen yang dimilikinya untuk secara serius membangun ekonomi syariah, karena ini adalah cara efektif untuk memberdayakan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan kesenjangan sosialekonomi. Kementerian dan lembaga pemerintah lainnya diharapkan juga untuk lebih memperhatikan pengembangan ekonomi syariah, antara lain dengan melibatkan industri keuangan syariah, serta pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran ekonomi keuangan syariah. *Keempat*, BI dan OJK agar melanjutkan upaya pengembangan ekonomi syariah dengan mendorong penguatan sinergi dengan para pelaku ekonomi syariah. Selain itu, dukungan dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga para akademisi, pelaku industri, dan para pemangku kepentingan lainnya juga sangat diperlukan. *Kelima*, memperkuat pengembangan ekonomi syariah dari sisi sistem, regulasi, instrumen, sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan UMKM, hal ini yang akan menjadi prioritas utama untuk mendukung pergerakan ekonomi syariah di tanah air. *Keenam*, penyederhanaan akses pembiayaan pada lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara diluar kawasan ASEAN juga diperlukan sepanjang membawa manfaat dan penguatan ekonomi syariah di Indonesia.

4. Simpulan

Konsekuensi MEA dan persiapan yang dibutuhkan jelas merupakan hal yang kompleks. Hal itu menuntut kontribusi dan kolaborasi parapemangku kepentingan untuk menghadapinya. Otoritas bersama-sama pelaku usaha harus bahu-membahu dan mengesyampingkan ego sektoral untuk membuat ekonomi produsen kita berdayasaing dalam MEA. Itu perlu didukung oleh semangat nasionalisme konsumen kita untuk lebih mencintai produk dan jasa yang dihasilkan oleh anak bangsa. Tanpa itu semua bisa-bisa pupus harapan meraih peluang terbuka di MEA. Kita terancam hanya jadi penonton dalam keriuhan MEA. Ini tidak baik bagi kewibawaan ekonomi dan bangsa Indonesia. Untuk itu, momentum MEA ini menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam Indonesia untuk dijadikan sebagai peluang besar. Tidak hanya menjadi pengamat atau penonton belaka, tetapi berani mengambil tindakan sebagai pelaku utama. Namun pelaku utama saja tidak cukup, sebagai umat Islam ada hal-hal yang lebih substansial yaitu menjadi agen pembawa misi Islam yang *rahmatan lil alamin* yang mempunyai semangatkeagamaan tinggi untuk memperbaiki dan mengangkat taraf kehidupan kaum dhuafa dan kaum lemah serta membantu tugas dakwah seperti yang sudah dilakukan oleh generasi umat pada masa lampau.

Daftar Pustaka

- Bakhri, Boy Syamsul, 2015, *Kesiapan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Dari Perspektif Daya Saing Nasional*, Jurnal *Economica*, Pekanbaru.
- Departemen Internasional Bank Indonesia, 2012, *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Peluang dan Tantangan*, Materi Sosialisasi Sinergi Tingkatkan Daya Saing Hadapi MEA 2015, Pekanbaru.
- Hamid, Edy Suandi, 2014, *Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015*, Materi Seminar Nasional ISEI Riau, Pekanbaru.
- Humas Bank Indonesia, *Gerai Info*, Edisi 29 Agustus 2012.
- Karya, Detri, 2014, *Perspektif Perdagangan Internasional dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015*, Materi Seminar Nasional ISEI Riau, Pekanbaru.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2014, *Peran Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Ekonomi Nasional untuk Menghadapi AEC*, Jakarta.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2012, *Meningkatkan Daya Saing Ekspor Nasional Menghadapi MEA 2015*, Materi Sosialisasi Sinergi Tingkatkan Daya Saing Hadapi MEA 2015, Pekanbaru.
- Zulkarnain, 2014, *Peran Kelembagaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Produk UMKM Menghadapi ASEAN Economic Community 2015*, Materi Seminar Nasional ISEI Riau.